

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
- C.S.T. Kansil. 1980. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Diana Halim Koentjoro, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Djoko Soepadmo. 1996. *ketentuan-ketentuan dan komentar mengenai Hukum Waris Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*. Cet. II. Surabaya: Bina Ilmu.
- Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu : Zara Abadi.
- Esmi Warassih, 2005, *Basis Sosial Hukum: Pertautan Ilmu Pengetahuan Hukum dan Ilmu Pengetahuan Sosial (dalam Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis)*, Semarang: PT Suryandaru Utama.
- G.H.S. Lumban Tobing. 1982. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.

- _____. 2020, *Unifikasi Pembuatan Keterangan Waris*. Cet. I. Makassar: Nas Media Pustaka.
- I. G. Warsanto. 1997. *Kearsipan I*. Cet. I. Yogyakarta: Kanisius.
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Negara / Indroharto*, Jakarta : Boom, Pustaka Sinar Harapan.
- Indrohato. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Irfan Fachruddin. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- J. Satrio. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Rawls. 1971. *A Theory of Justice*. Cambridge: Massachusetts the Belknap Press of Harvard University Press.
- Kamal Hidjaz. 2010. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka refleksi.
- Miriam Budiardjo. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Nur Basuki Winanrno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: laksbang mediatama.
- Oemarsalim. 1987. *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*. Jakarta: Bina Askara.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2.
- Prajudi Atmosudirjo. 1995. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. *Hukum Notariat di Indonesia-Suatu Penjelasan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *Hukum dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum administrasi negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Cet. IV. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Soegondo Notodisoerjo. 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmyah. 2005. *Hukum Kewarisan Perdata Barat*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Surini Ahlan Sjarif. 1992. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*.

Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tan Thong Kie. 1994. *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*. Jakarta:

Ichtiar Baru Van Hoeve.

Trie Sakti. *et al.* 2013. *Kamus Pertanahan I*. Jakarta: Pusat Penelitian

Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Wati kahmi kia. 2008. *Aspek Yuridis Tentang Hukum Waris*. Lampung:

universitas Lampung.

Wirjono Projodikuro. 1962. *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: IS

Gravennage Vorking van Hove.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

C. Tesis

Ferawaty. 2017. *kedudukan surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris*

dalam proses turun waris. Tesis. Universitas Andalas.

Miranti Kusuma Wardhani. 2021. *Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat*

Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota

Cirebon). Tesis. Universitas Islam Sultan Agung.

D. Jurnal

Muhammad Rafli. *et al.* 2024. *Peran Notaris dalam Pengaturan Hak Ahli Waris dalam Kasus Warisan Tanah dan Properti Di Kepulauan Selayar*. Volume 5 Nomor 1. Qawanin Jurnal Ilmu Hukum.

Philipus M. Hadjon. 1997. *Tentang Wewenang*. Volume 7 Nomor 5-6. Yuridika.

Julista Mustamu, 2011, *Diskresi Dan Tanggungjawab Administrasi Pemerintahan*, Volume 17 Nomor 2. Jurnal Sasi.

E. Majalah

Oe Siang Djie. 1991. *Tentang Surat Keterangan Hak Waris*, Majalah Media Notariat no. 18 - 19 Tahun VI. Ikatan Notaris Indonesia. Edisi Januari-April 1991.

Ting Swan Tiong. 1988. *Pembuktian Hak atas Harta Peninggalan*. Majalah Media Notariat no.6-7 Tahun ke III. Edisi April 1988.

F. Website

Arief Rachman. <https://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>. Artikel Edisi 20 Desember 2023.

Dodi Oktarino. <http://idehukum.blogspot.com/2012/05/sejarah-lahirnya-notaris.html>. Artikel Edisi 23 Desember 2023.

Taligara. <https://taligara.wordpress.com/2014/12/03/notaris-mewakili-negara/>. Artikel Edisi 21 Desember 2023.